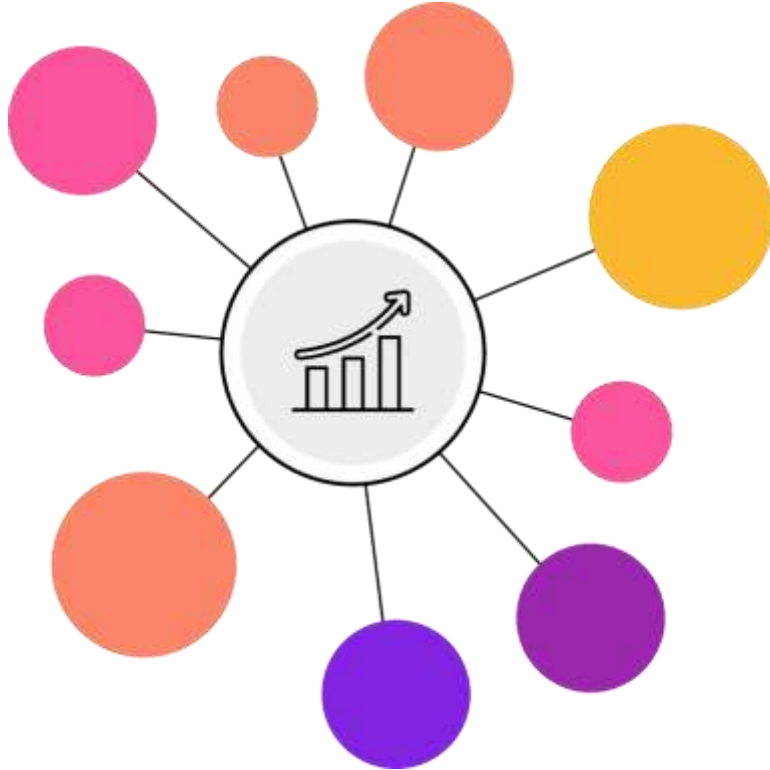




PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN



PROSES BISNIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET TAHUN 2024

KETERKAITAN RPJMD DENGAN RENSTRA BPKAD

RPJMD		RENSTRA BPKAD				
TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah melalui inovasi, perencanaan berkualitas dan pelayanan publik	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK	1.Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
					Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	
					Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
				2.Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan	1.Nilai Sakip Perangkat Daerah 2.Indeks Kepuasan Masyarakat	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

CASCADING PERENCANAAN BPKAD LAMONGAN

Tujuan RPJMD	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
Indikator Tujuan	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)			
Sasaran RPJMD	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah melalui inovasi, perencanaan berkualitas dan pelayanan publik			
Indikator Sasaran	Opini BPK			
Tujuan BPKAD	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
Indikator Tujuan	Opini BPK			
Sasaran BPKAD	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
Indikator Sasaran	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal
Program BPKAD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Indikator Program	Persentase tahapan penyusunan APBD yang tepat waktu	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan SAP	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan SAP	Persentase PD yang tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah
Kegiatan BPKAD	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah
Indikator Kegiatan	Persentase Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang tersusun tepat waktu/sesuai ketentuan	Persentase OPD yang melakukan penatausahaan keuangan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku	Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang di susun
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Inventarisasi Barang Milik Daerah
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen kartu inventaris barang audited, jumlah dokumen kartu inventarisasi barang unaudited, jumlah label barang, jumlah OPD yang dilakukan inventarisasi BMD

CASCADING KINERJA BPKAD BANGKALAN

Kepala Daerah

Kepala Badan

Kepala Bidang

Kepala Seksi

Staf

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Indikator : Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Indikator:

1. Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan
2. Persentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah

Terwujudnya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

INDIKATOR :
jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun

Terwujudnya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

INDIKATOR :
jumlah dokumen laporan BUD yang disusun

Terwujudnya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

INDIKATOR :
jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disusun

Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah

INDIKATOR :
Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang disusun

Terwujudnya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

INDIKATOR :
Jumlah dokumen RKA dan RKA Perubahan yang selaras dengan dokumen R-APBD

Terwujudnya Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

INDIKATOR :
Jumlah OPD yang di tertibkan SP2D secara tepat waktu

Terwujudnya Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

INDIKATOR :
Jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten

Terwujudnya Inventarisasi Barang Milik Daerah

INDIKATOR :
Jumlah Dokumen kartu inventaris barang audited, jumlah dokumen kartu inventarisasi barang unaudited, jumlah label barang, jumlah OPD yang dilakukan inventarisasi BMD

Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi RKA APBD dan Perubahan APBD

INDIKATOR :
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Verifikasi RKA APBD dan Perubahan APBD

Terlaksananya pelayanan pencairan belanja SKPD

INDIKATOR :
Jumlah Dokumen Penerbitan SP2D

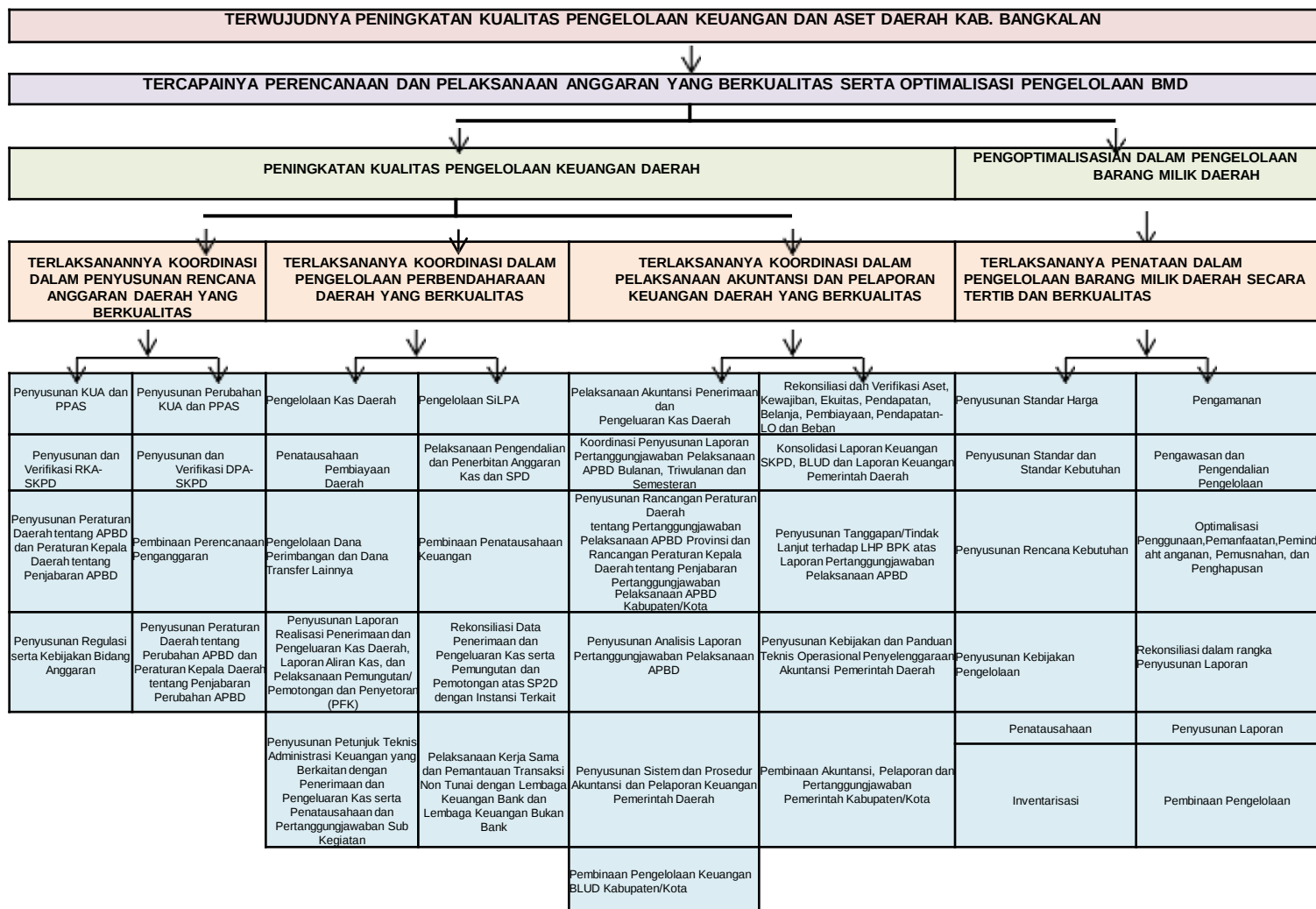
Terlaksananya Rekonsiliasi Laporan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan APBD Akhir Tahun dan terlaksananya rekonsiliasi laporan peraturan Bupati Pertanggungjawaban Keuangan APBD akhir tahun

INDIKATOR :
Jumlah Laporan hasil Rekonsiliasi Laporan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan APBD Akhir Tahun dan terlaksananya rekonsiliasi laporan peraturan Bupati Pertanggungjawaban Keuangan APBD akhir tahun

Tersedianya Kelengkapan Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan dalam kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah

INDIKATOR :
Jumlah laporan hasil konsolidasi Laporan BMD berdasarkan hasil rekon tiap Semester dan Tahunan

POHON KINERJA BPKAD



TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANGKALAN

IK : OPINI BPK ATAS LKPD KABUPATEN BANGKALAN

TERCAPAINYA PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN YANG BERKUALITAS SERTA OPTIMALISASI PENGELOLAAN BMD

IK : AKURASI PENGANGGARAN, DEVIASI SERAPAN BELANJA, KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LKPD, PEMANFAATAN PENGGUNAAN BMD

PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

IK : KETEPATAN PELAKSANAAN PENGANGGARAN, SOP DALAM PELAYANAN, PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN OPD,

PENGOPTIMALISASIAN DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

IK : PENERBITAN PENYUSUNAN LAPORAN BMD SECARA ADMINISTRASI, FISIK, DAN HUKUM

TERLAKSANNANYA KOORDINASI DALAM PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH YANG BERKUALITAS

IK : JUMLAH DOKUMEN RENCANAAN KEUANGAN YANG DISUSUN

TERLAKSANNANYA KOORDINASI DALAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH YANG BERKUALITAS

IK : JUMLAH DOKUMEN LAPORAN BUD YANG DISUSUN

TERLAKSANNANYA KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH YANG BERKUALITAS

IK : JUMLAH DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN DAERAH YANG DISUSUN

TERLAKSANNANYA PENATAAN DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SECARA TERTIB DAN BERKUALITAS

IK : JUMLAH DOKUMEN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH YANG DISUSUN

Penyusunan KUA dan PPAS IK : Jumlah Dokumen Kua Dan Ppas Apbd Murni Tahun Anggaran Berikutnya	Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS IK : Jumlah Dokumen Kua Ppa Dan Kupa Ppa Perubahan Apbd Tahun Anggaran Berikutnya	Pengelolaan Kas Daerah IK : Jumlah Laporan Posisi Kas Daerah	Pengelolaan SILPA IK : Jumlah Dokumen Pengelolaan Sila Lebih Penutupan Anggaran Tahun Selanjutnya	Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah IK : Jumlah Dokumen Lra Konsolidasi Bulanan	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban IK : Jumlah Dokumen Buku Memori, Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi	Penyusunan Standar Harga IK : Jumlah Dokumen Sdh	Pengamanan IK : Jumlah Papan Nama Kepemilikan, Jumlah Sertifikat Tanah
Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD IK : Jumlah Dokumen Rka Dan Rka Perubahan Yang Selaras Dengan Dokumen Rgpd	Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD IK : Jumlah Dokumen Dpa Dan Dpa Yang Selaras Dengan Dokumen Apbd	Penatausahaan Pembiayaan Daerah IK : Jumlah Dokumen Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Pelaksanaan Pengendalian dan SPD IK : Jumlah Dokumen Opd	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semester IK : Jumlah Dokumen Jeda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Yang Disusun	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah IK : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi	Penyusunan Standar dan Standar Kebutuhan IK : Jumlah Dokumen Standar dan Standar Kebutuhan Barang	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan IK : Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Dan Pengawasan Bangunan
Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD IK : Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Yang Disusun Dan Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Kdih Tentang Apbd Yang Disusun	Pembinaan Perencanaan Penganggaran IK : Jumlah Kegiatan Pembinaan Yang Dilakukan	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya IK : Jumlah Laporan Dana Transfer	Pembinaan Penatausahaan Keuangan IK : Jumlah Opd Yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota IK : Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Kdih Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD IK : Jumlah Dokumen Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap Lhp Rpk Atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd	Penyusunan Rencana Kebutuhan IK : Jumlah Dokumen Rencan Dan Rencan	Optimalisasi Penggunaan, Pemertan, Pemindahtanganan, Penurusan, dan Penghapusan IK : Jumlah Barang Milik Daerah Yang Akan Dikatakan Pensiun/abstansi (Sewa, Hibah, Pinjam Pakai)
Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran IK : Pedoman Pelaksanaan Apbd	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD IK : Jumlah Dokumen Rencan Tentang Perubahan Apbd Yang Disusun	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyeteroran (PFK) IK : Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, Dan Pfk	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Lembaga Keuangan Bank dan Pemotongan atas SP2D Tertakl IK : Jumlah Laporan Rekonsiliasi Data Penerimaan, Pengeluaran Dan Pemotongan Atas Sp2d	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD IK : Jumlah Dokumen Laporan Analisis Keuangan Daerah Yang Di Susun	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah IK : Jumlah Dokumen Kebijakan Dan Sop	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan IK : Jumlah Dokumen Peraturan Perundangan	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan IK : Jumlah Opd Yang Mengikuti Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
POHON KINERJA : KLASIFIKASI LEVEL KINERJA		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan IK : Jumlah Buku Sdru Perbendaharaan, Sosialisasi Dan Bimtek	Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank IK : Jumlah Opd Yang Di Terbitkan Sp2d Secara Tepat Waktu	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah IK : Jumlah Dokumen Laporan Informasi Keuangan Daerah Yang Disusun	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota IK : Jumlah Opd Yang Mengikuti Dokumen Pertanggungjawaban	Penatausahaan IK : Jumlah Dokumen Peraturan Perundang, Jumlah Peningkatan Tertib Penatausahaan Bmd, Sosialisasi Penatausahaan Barang	Penyusunan Laporan IK : Jumlah Buku Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
						Inventarisasi IK : Jumlah Dokumen Kartu Inventaris Barang Auditel, Jumlah Dokumen Kartu Inventarisasi Barang Unaudited, Jumlah Label Barang, Jumlah Opd Yang Dilakukan Inventarisasi Bmd	Pembinaan Pengelolaan IK : Jumlah Sdm Pengelola Barang Milik Daerah Yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sosialisasi Pengelolaan Bmd

SKEMA PROSES BISNIS BPKAD BANGKALAN

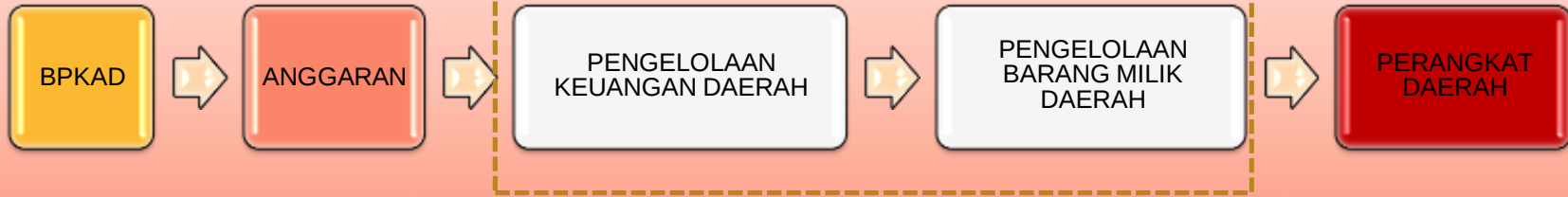
PROSES BISNIS MANAJEMEN

PENGELOLAAN KINERJA

KEPATUHAN INTERNAL

MITIGASI RESIKO

PROSES BISNIS INTI



PROSES BISNIS PENDUKUNG

PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

KETERSEDIAAN SDM

ORGANISASI

SARANA
PRASARANA

PROSES BISNIS MANAJEMEN

Pengelola Kinerja :

Menyelaraskan SOP sesuai dengan visi dan misi. Dalam Pengelolaan Kinerja BPKAD selalu berpedoman pada indikator indikator yang sudah di tetapkan. Pengelolaan Kinerja juga menyentuh aspek kepatuhan Internal dan Pengelolaan Resiko

Kepatuhan Internal :

Mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang sesuai Tupoksi dan SOP

Mitigasi Resiko:

Memaksimal kan pencapaian tujuan dengan jalan merencanakan solusi sesuai dengan permasalahan yang mungkin muncul



Evaluasi
Kinerja



Perencanaan
Kinerja

Pengelolaan
Kinerja



Pelaporan
Kinerja

Pengukuran
Kinerja



PROSES BISNIS INTI BPKAD BANGKALAN

01

PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH



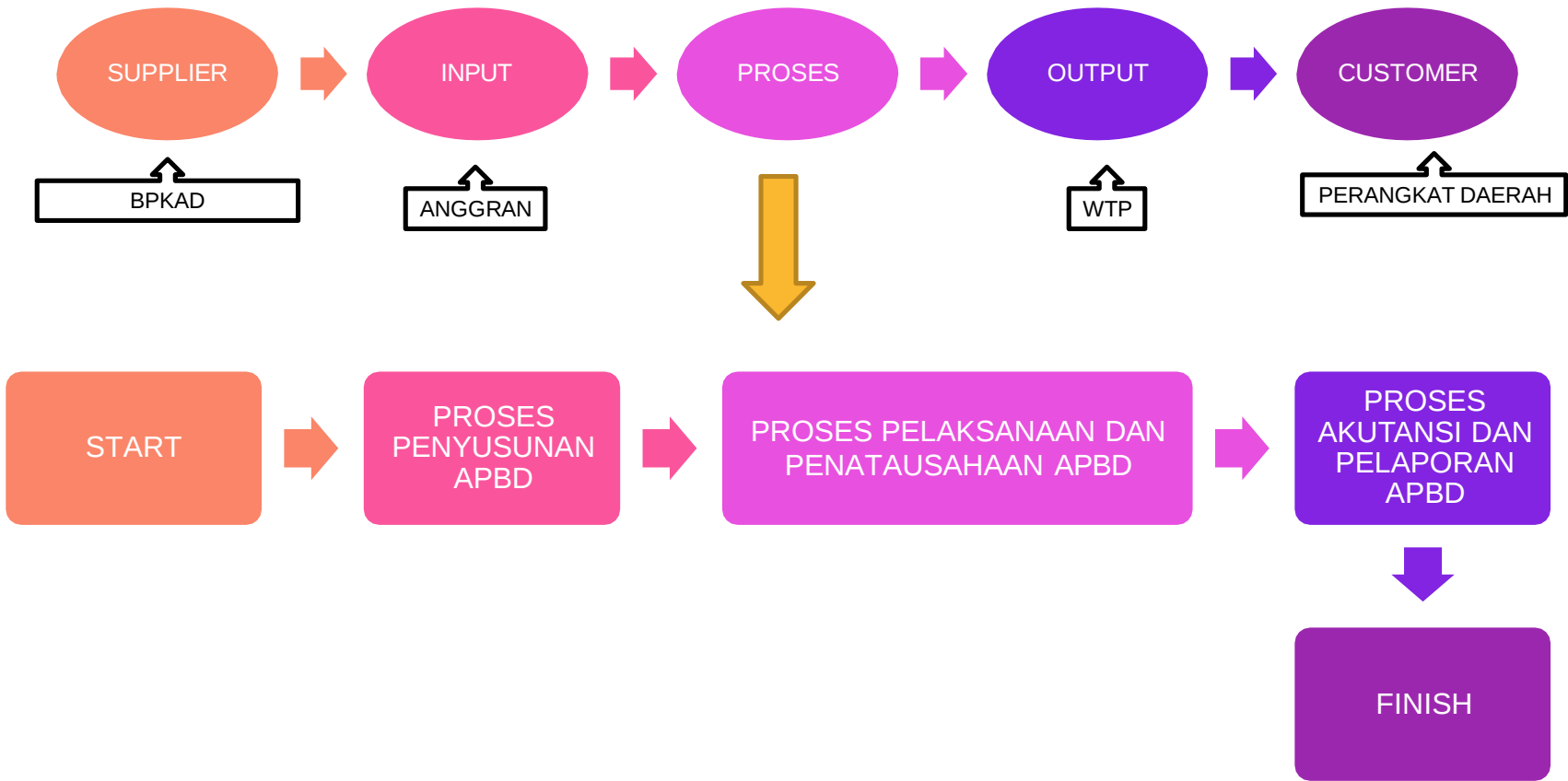
02

PENGELOLAAN
BARANG MILIK
DAERAH



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

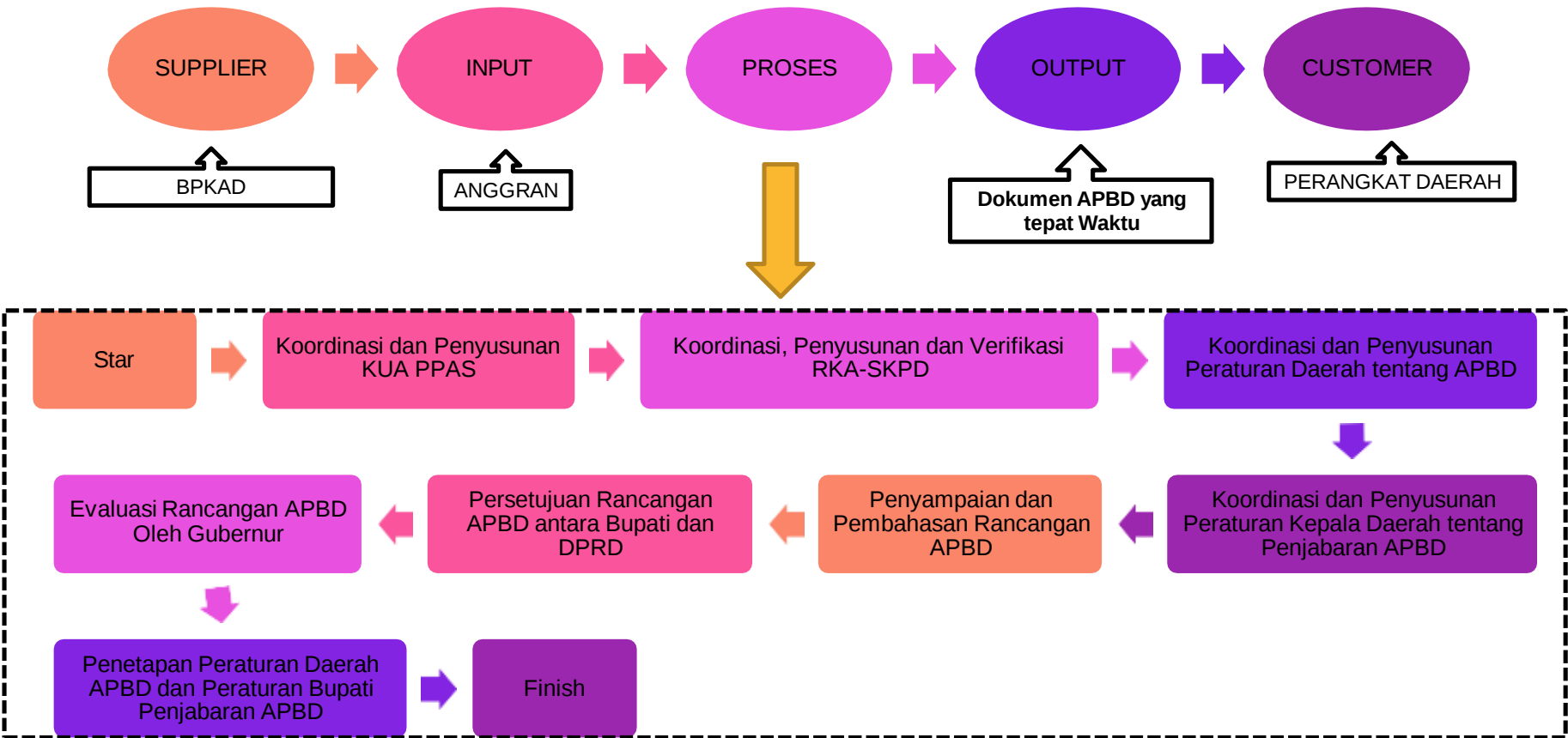
LEVEL I



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

LEVEL II

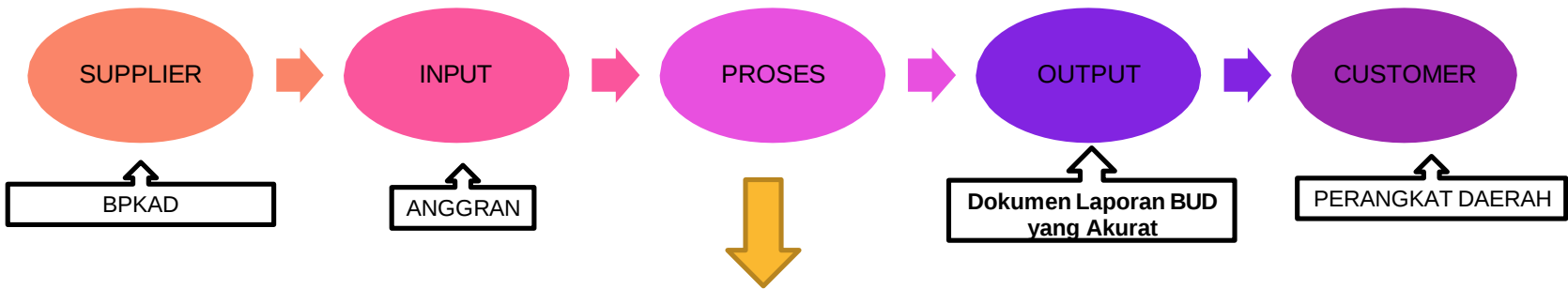
PROSES PENYUSUNAN APBD



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

LEVEL II

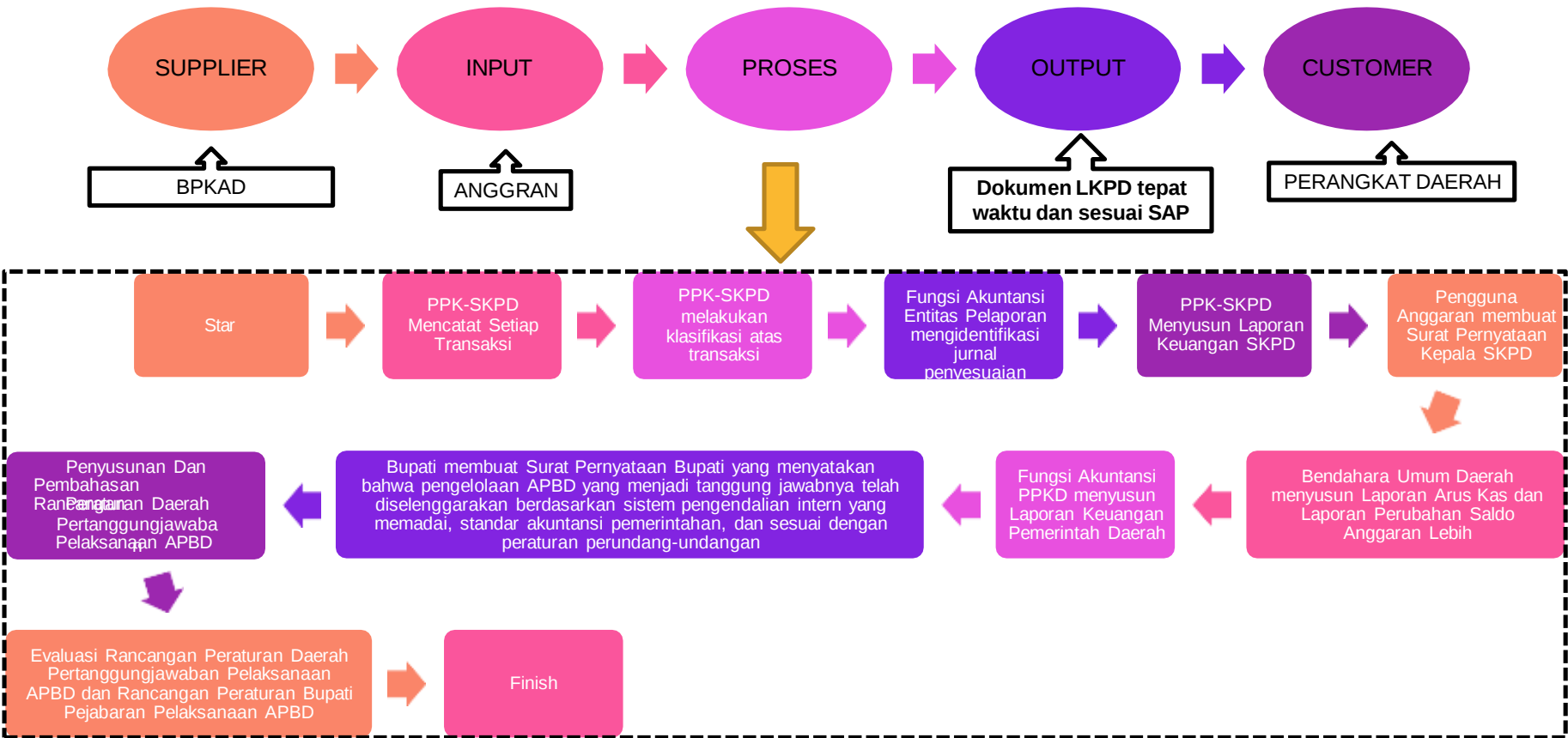
PROSES PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN APBD



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

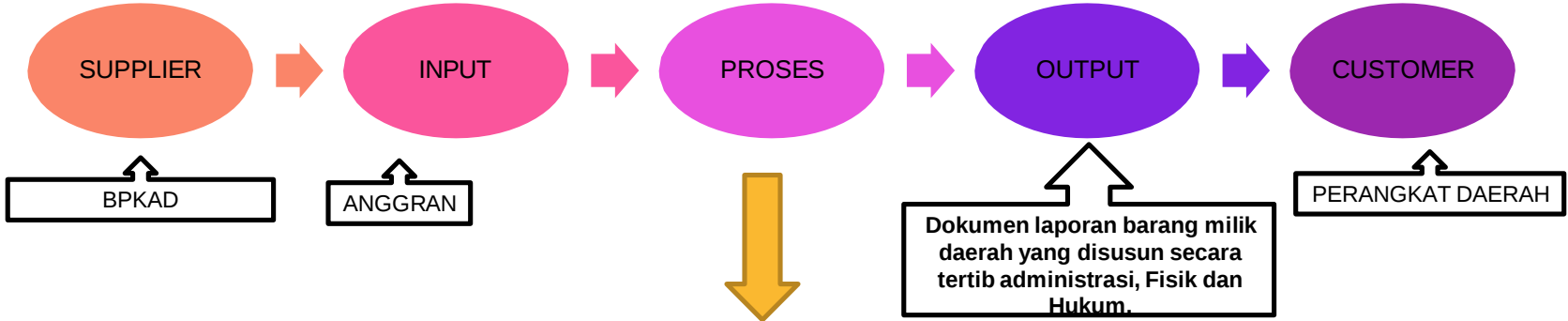
LEVEL II

PROSES AKUTANSI DAN PELAPORAN APBD



PROSES BISNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

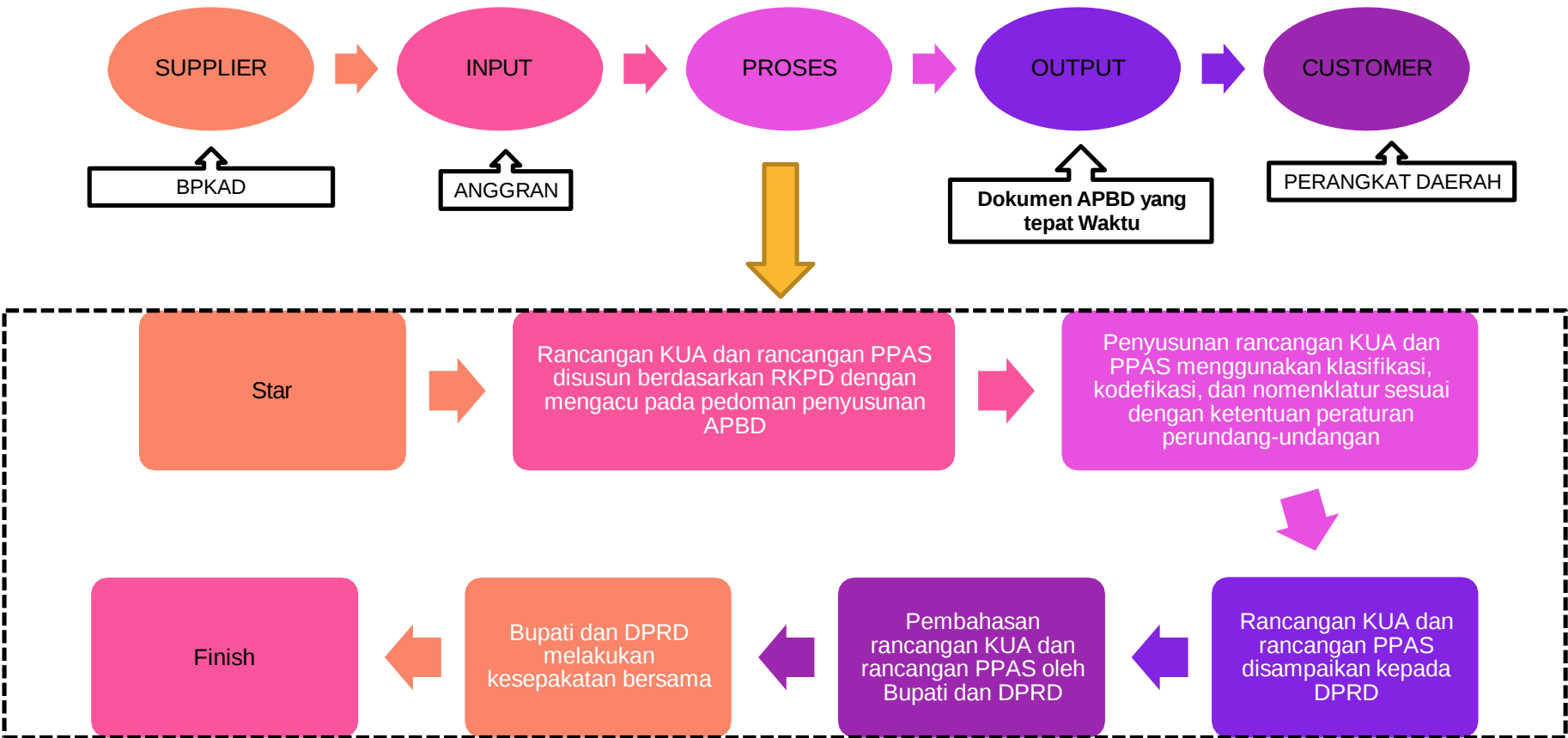
LEVEL II



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

LEVEL III

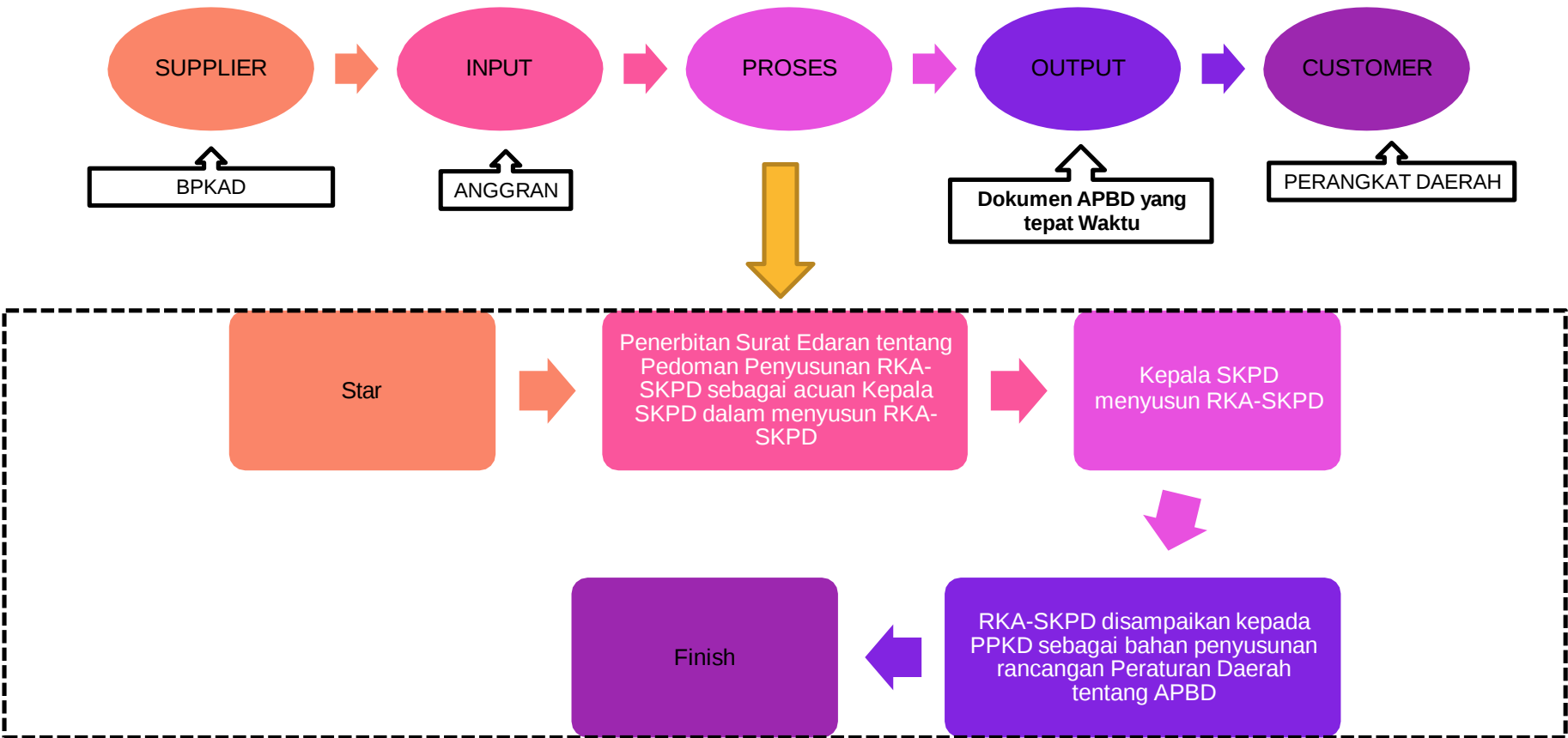
Proses Penyusunan KUA PPAS



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

LEVEL III

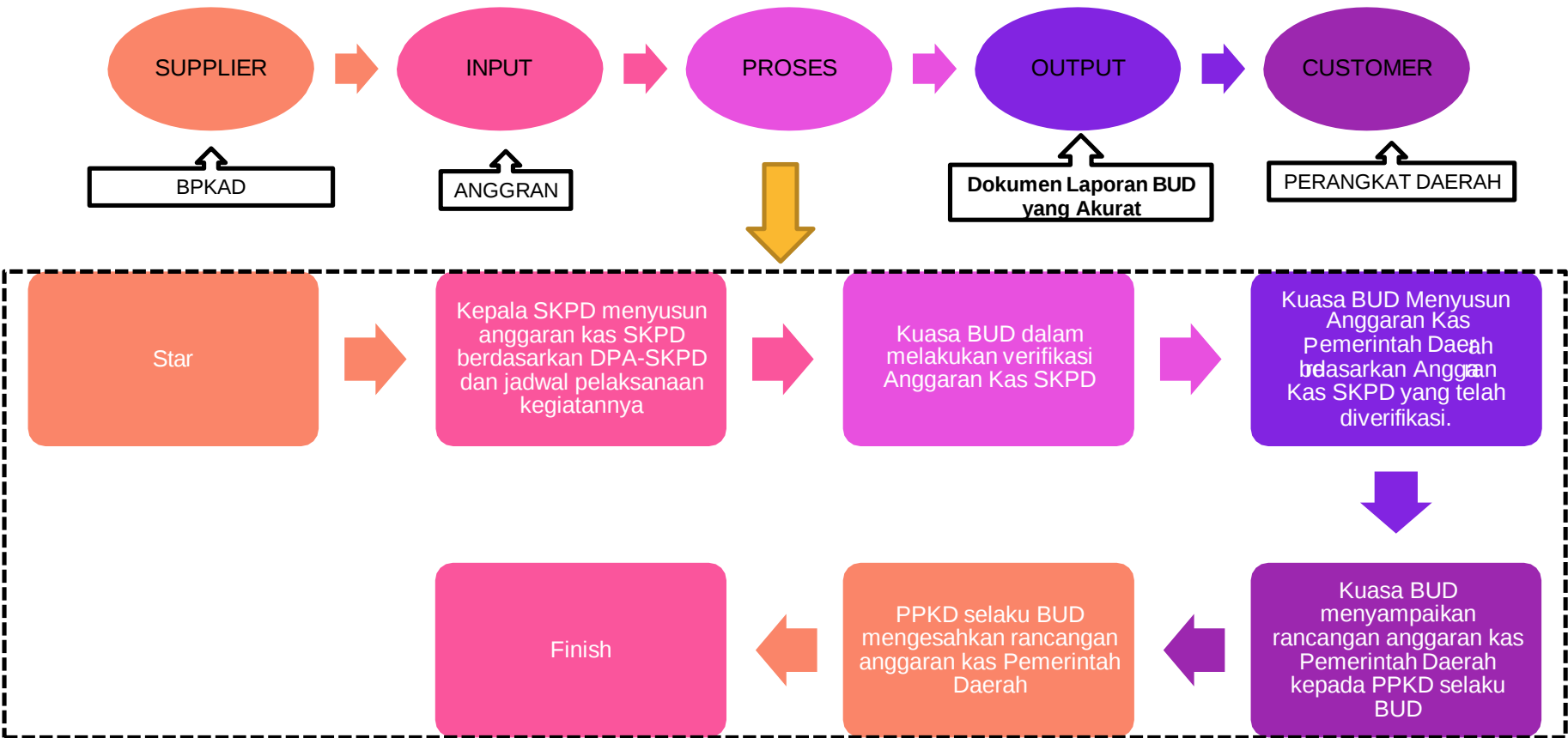
PROSES PENYUSUNAN RKA-SKPD



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

LEVEL III

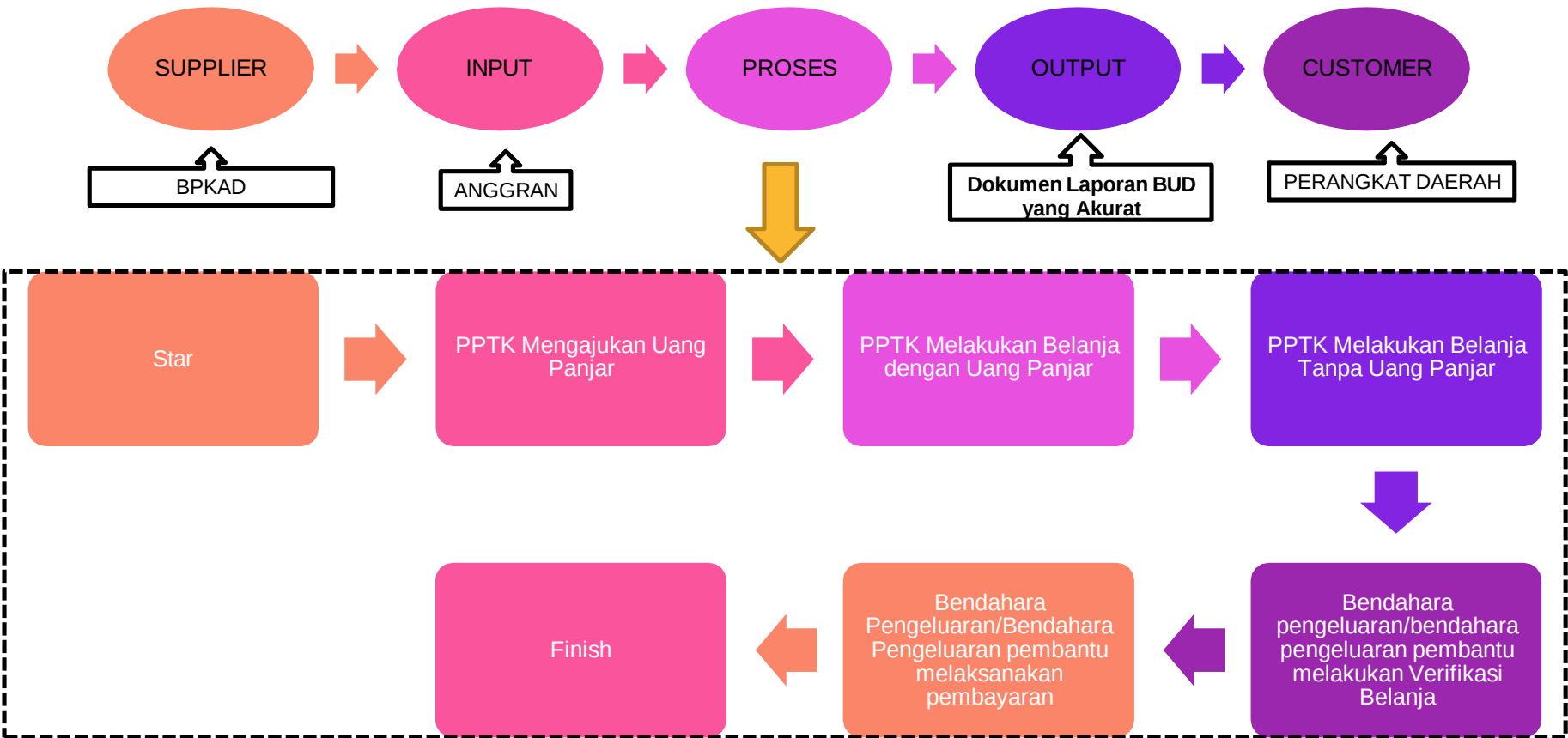
PROSES PENYIAPAN PENYIAPAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

PROSES PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA

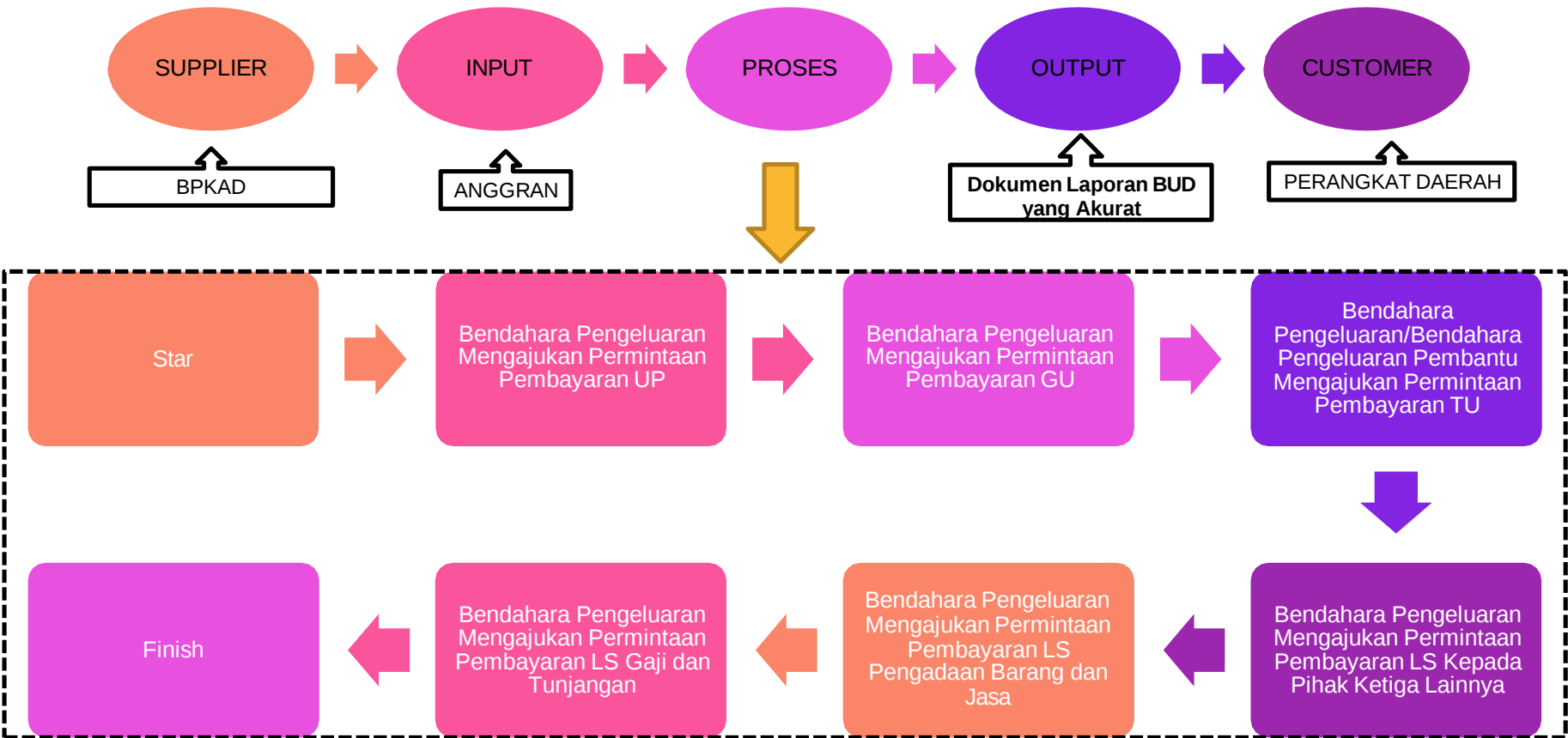
LEVEL III



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

PROSES PERMINTAAN PEMBAYARAN

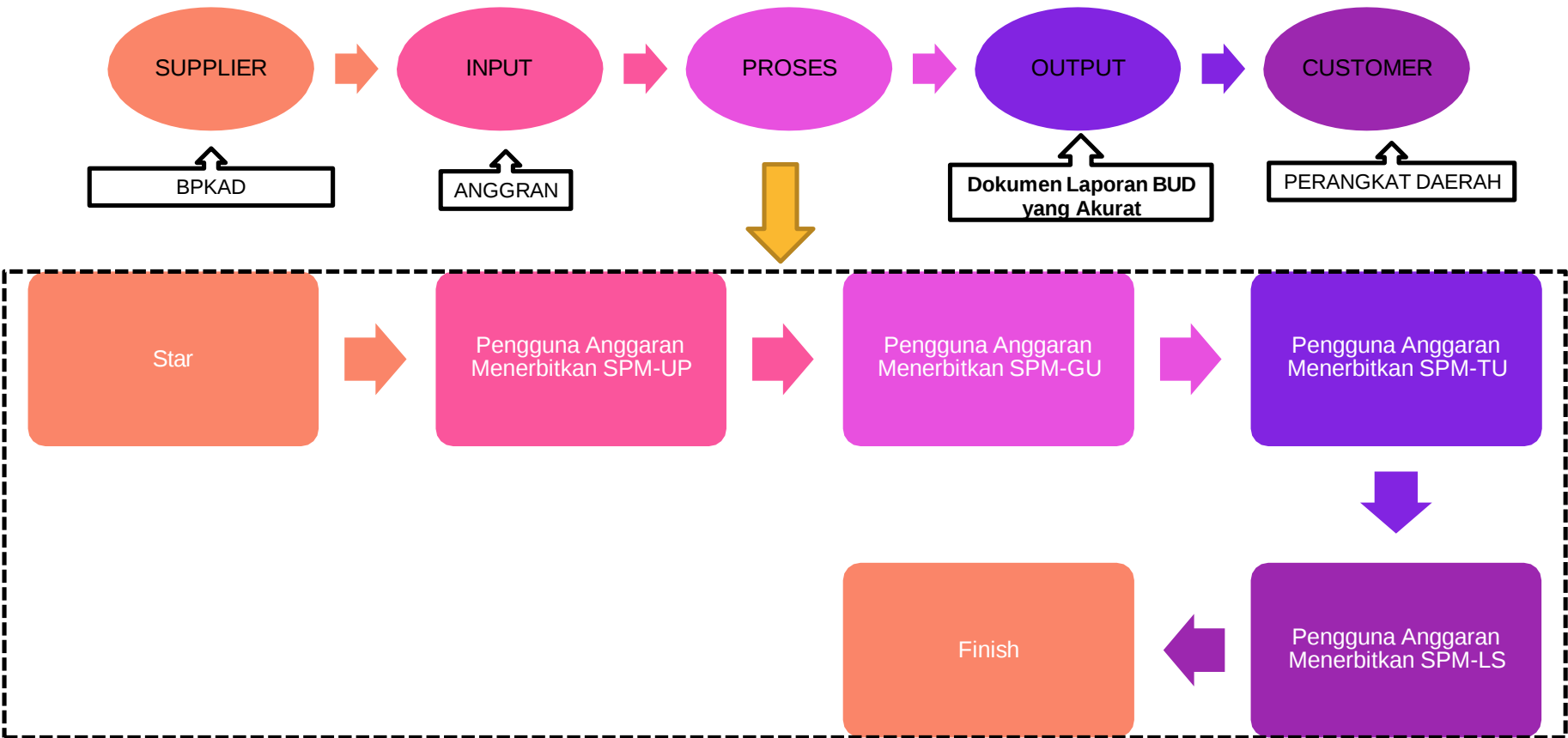
LEVEL III



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

PROSES PERINTAH MEMBAYAR

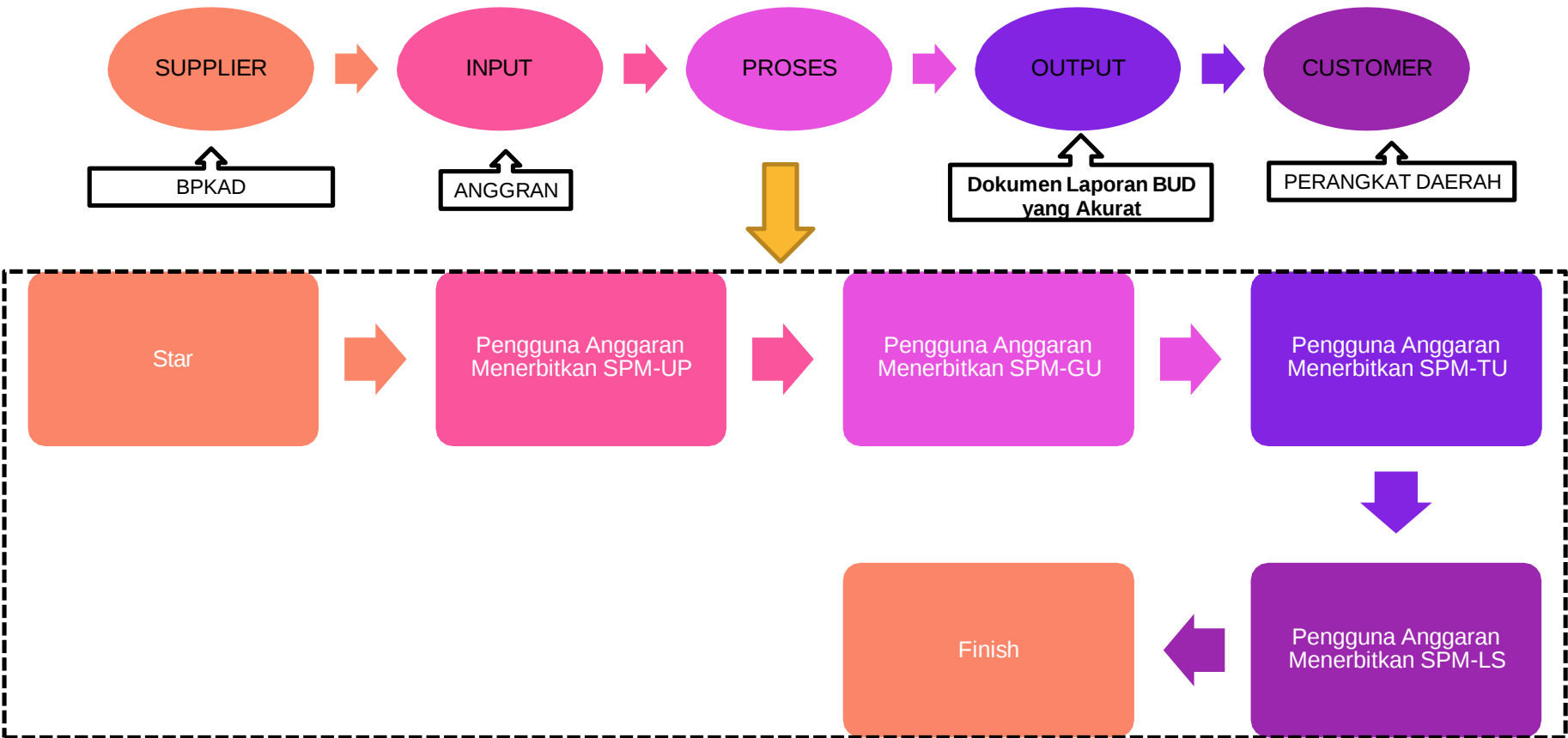
LEVEL III



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

PROSES PERINTAH MEMBAYAR

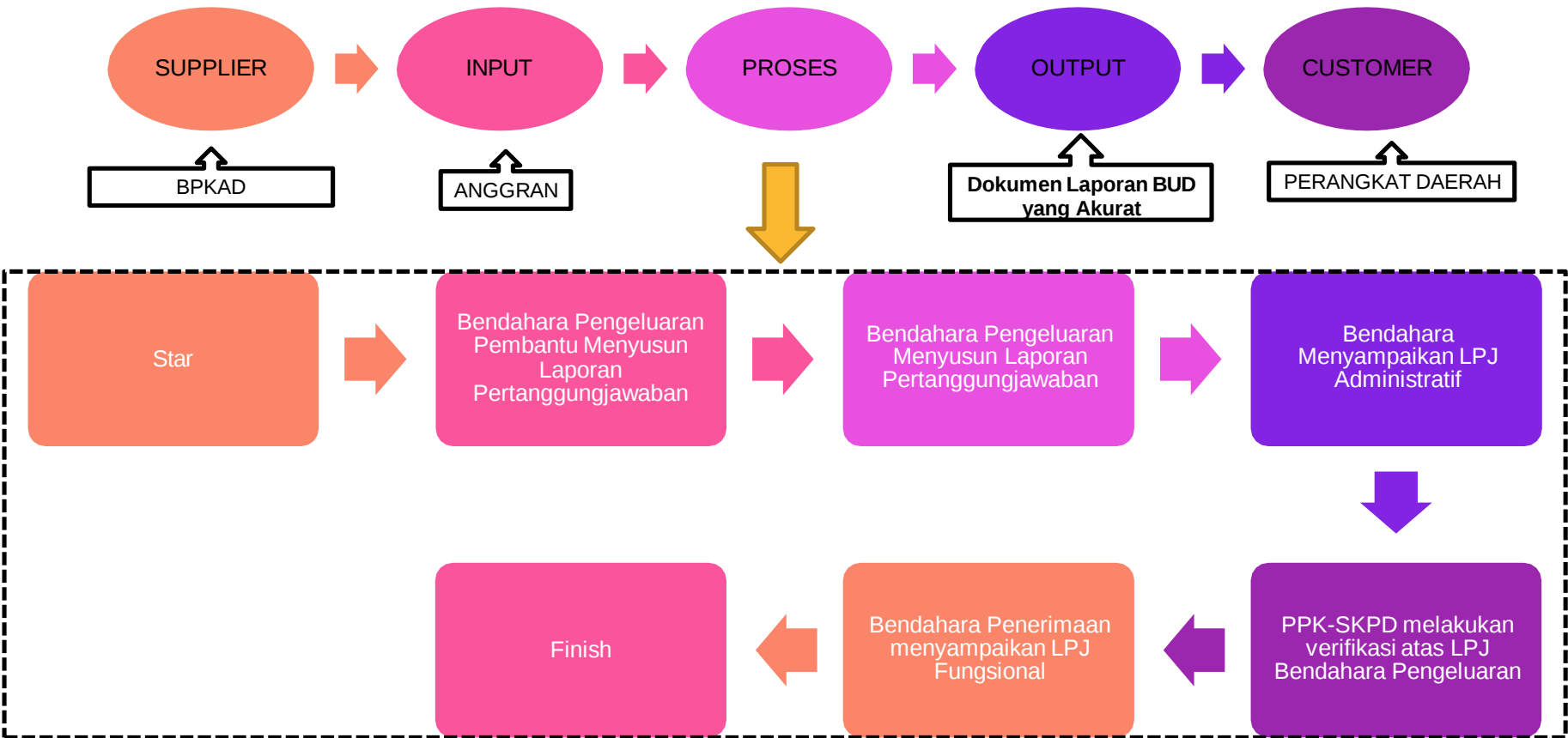
LEVEL III



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

LEVEL III

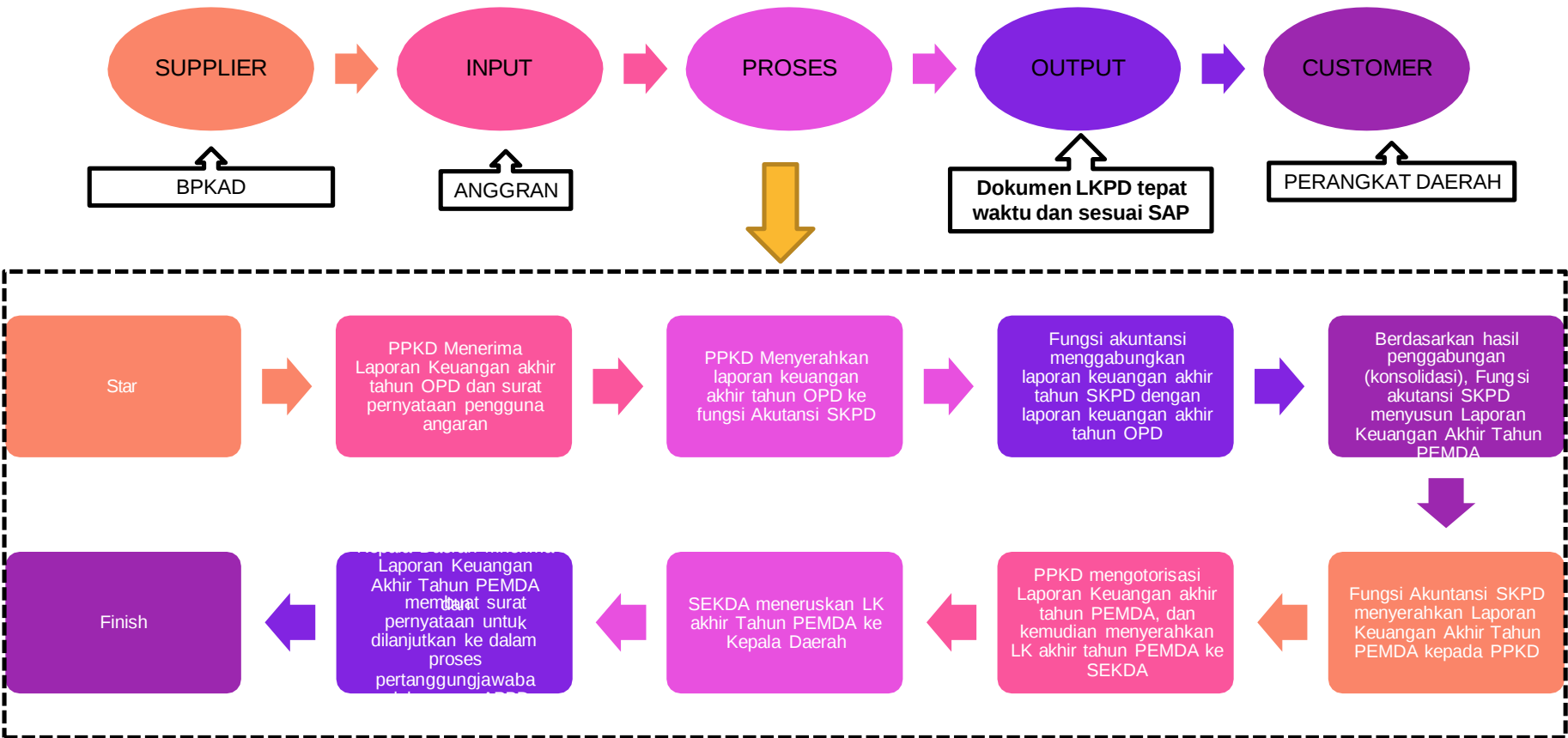
PROSES PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

LEVEL II

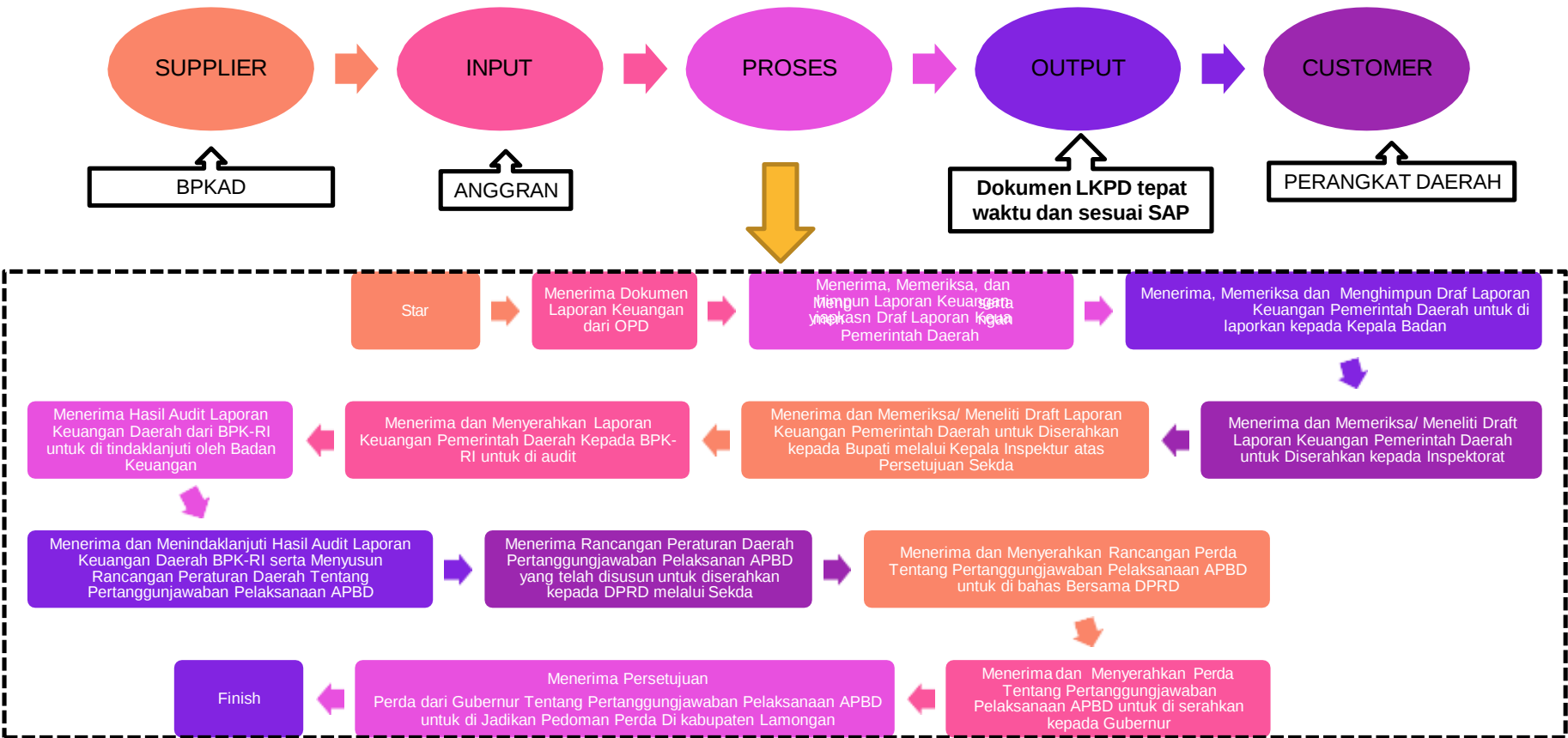
PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

LEVEL III

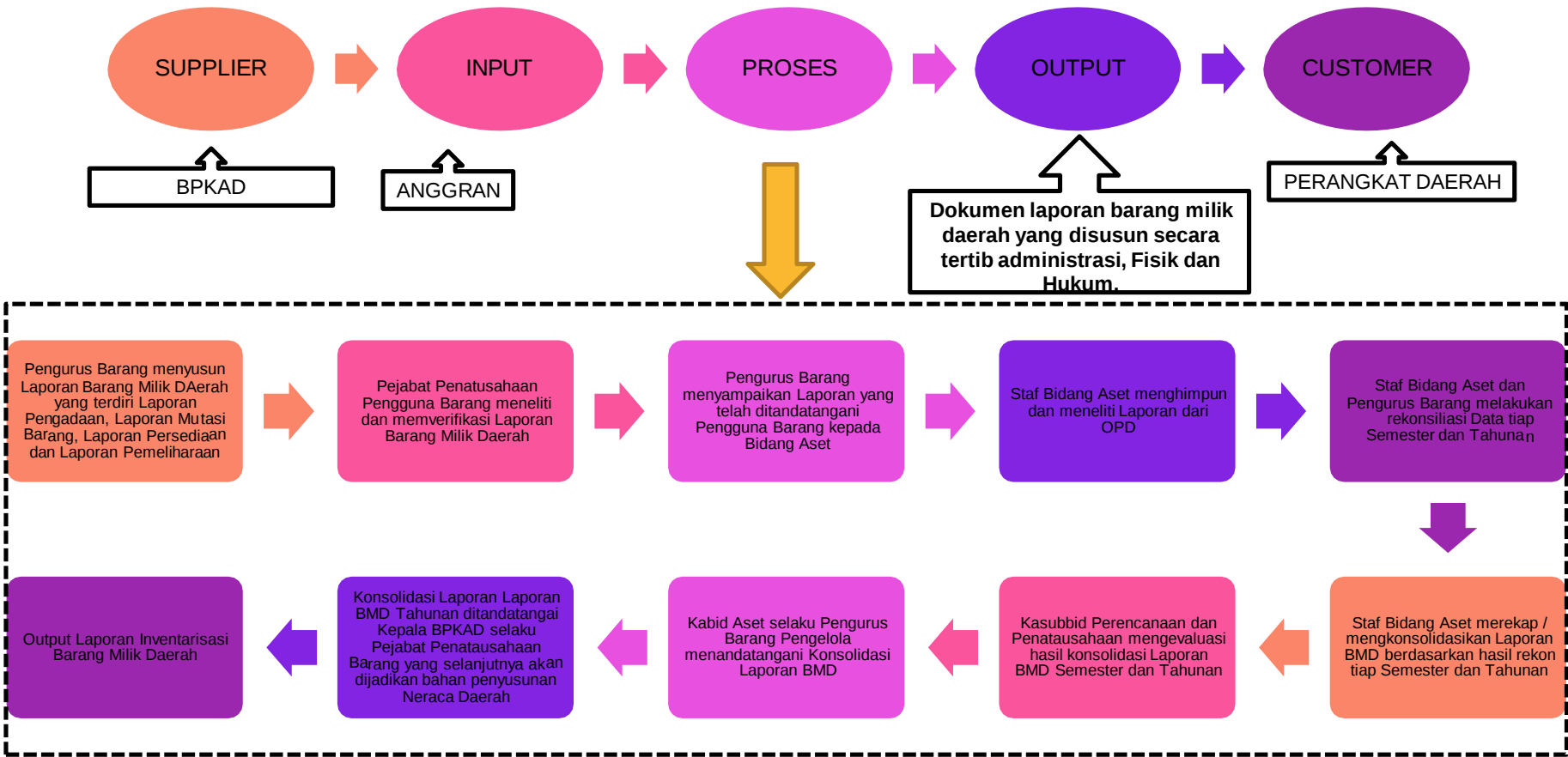
PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD



PROSES BISNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

LEVEL III

PROSES INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH



TERIMAKASIH